

JURNAL

KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI YANG BERBEDA ANTARA BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI PENYIDIK DENGAN KETERANGAN SAKSI DI PERSIDANGAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 465/PID.B/2009/PN.BJN

ARTIKEL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**BETHA INTAN JUNETHA M.S
NIM. 0910113088**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

**LEMBAR PERSETUJUAN
JURNAL**

**KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI YANG BERBEDA ANTARA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI PENYIDIK DENGAN KETERANGAN
SAKSI DI PERSIDANGAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM
NOMOR 465/PID.B/2009/PN.BJN**

**Oleh:
BETHA INTAN JUNETHA M.S
NIM. 0910113088**

Disetujui pada tanggal

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. NuriniAprilianda, SH. MH
NIP. 19760429 200212 2 001

Paham Triyoso, SH. M.Hum
NIP. 19540517 198203 1 003

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati, SH. M.Hum
NIP. 19590406 198601 2 001

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Berbeda Antara Berita Acara Pemeriksaan Di Penyidik Dengan Keterangan Saksi Di Persidangan Terhadap Putusan Hakim Nomor 465/PID.B/2009/PN.BJN. Disini penulis meneliti mulai dari Berita Acara Pemeriksaan kepolisian, Surat Dakwaan, Berita Acara Pemeriksaan di Pengadilan, hingga Putusan pengadilan terkait kasus melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus yakni meneliti kasus asusila yang diputus pidana selama 3 tahun berdasarkan pasal 81 ayat 1 tentang UU Perlindungan Anak.

Dari hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa keterangan saksi yang berbeda antara Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan dengan keterangan saksi di persidangan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian karena keterangan saksi yang bersumber dari orang lain maka tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian. Keterangan saksi yang berbeda antara Berita Acara Pemeriksaan di penyidik dengan keterangan saksi di persidangan tidak berpengaruh terhadap putusan hakim nomor 465/PID.B/2009/PN.BJN, adanya rekayasa keterangan saksi yang bertujuan untuk memberikan keterangan palsu. Dari penelitian ini diharapkan ke depan dapat tercipta putusan-putusan hakim yang tidakmeninggalkanteori demi menciptakan keadilan dan ketertiban masyarakat.

Kata Kunci: Kekuatan Alat Bukti, Keterangan Saksi Yang Berbeda, Putusan Hakim

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the strength of Witness Testimony Evidence That Different Between Interrogation In Witness Testimony Investigator With Verdict In Trial Against Judge Number 465/PID.B/2009/PN.BJN. Here the authors examined ranging from police Interrogation, Indictment, Interrogation at Court, Court decisions related to cases of violence or threats of violence to force children to do intercourse with him or with anyone else. This research was conducted with the approach of the legislation and the case-based approach examines the terminated criminal cases immoral for 3 years under article 81 paragraph 1 of the Law on Child Protection.

From the analysis that has been done, it can be seen that the different witnesses among Investigation Report on the investigation with the testimony of witnesses at the trial does not have the force of law because the evidence derived from the testimony of others that do not have the force of law of evidence. Witness statements that differ between the investigators Interrogation with witness testimony in the trial judge's ruling does not affect the number 465/PID.B/2009/PN.BJN, the witness engineering that aims to give false testimony. From this study are expected to be created by the decisions of the judges who did not leave for the sake of creating a theory of justice and public order.

Key Words: *The Power of Evidence, Difference Witness Testimony, Judge Verdict*

PENDAHULUAN

Alat bukti berupa keterangan saksi sangatlah lazim dipergunakan dalam penyelesaian perkara pidana, keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah memang telah terjadi suatu perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan terdakwa. Keberadaan saksi untuk memberikan keterangan dalam penyelesaian. Perkara pidana disebutkan dalam Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri.” Berkaitan dengan berita acara pemeriksaan, bahwa alat bukti yang pertama adalah keterangan saksi. Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, alat bukti dalam pasal 184 antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Menurut KUHAP tersebut salah satu alat bukti, keterangan saksi yang terdapat dalam pasal 184 yaitu seseorang yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri tentang terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan 185 ayat 2 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan hal tersebut agar menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang, kesaksian yang diberikan harus lebih dari satu saksi dalam memberikan keterangan. Menurut hukum positif Indonesia hanya menggunakan saksi korban belum cukup untuk dijadikan sebuah alat bukti.

Keterangan saksi di depan persidangan berbeda dengan berkas acara pemeriksaan penyidik sering terjadi dalam praktik peradilan di Indonesia. Keterangan saksi berbeda dengan keterangan yang diberikan pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik dan keterangan yang diberikan didalam persidangan. Keterangan saksi yang diberikan dipersidangan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat. Keterangan saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian keterangan yang diberikan harus mempunyai alasan-alasan yang logis, masuk akal serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Berdasarkan pasal 163 KUHAP saksi diperbolehkan untuk memberikan keterangan yang berbeda antara Berita Acara Pemeriksaan dipenyidikan dengan keterangan yang diberikan pada waktu dipersidangan.

Persidangan perkara pidana di Indonesia juga dijumpai keterangan saksi yang berbeda Antara Berita Acara Pemeriksaan penyidikan dan berita acara persidangan terhadap putusan pengadilan. Seperti pada kasus melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan. Untuk lebih memahami tentang keterangan saksi yang berbeda antara berita acara pemeriksaan dengan persidangan, berikut ini adalah contoh kasus keterangan saksi yang berbeda antara Berita Acara Pemeriksaan penyidik dengan persidangan, yaitu : Pada tahun 2009 Pengadilan Negeri Bojonegoro mengadili kasus melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kasus tersebut dilakukan oleh tersangka Sukri bin Darmin terhadap korban Novi Sri Utami Binti Surip, yang terjadi sebanyak kurang lebih 3 (Tiga) kali, di Hotel Sahabat Mulia Jalan WR. Supratman Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro.¹

Berdasarkan Berita Acara Persidangan diulas terdapat beberapa keterangan saksi yang berbeda antara Berita Acara Pemeriksaan penyidik dan Berita Acara Persidangan. Tidak sesuai keterangan yang diberikan oleh saksi diungkapkan pada saat pertanyaan yang diberikan oleh majelis hakim kepada saksi 1 atau saksi korban yang bernama Novi Sri Utami Binti Surip tersebut. Novi memberikan keterangan yang tidak sesuai dikarenakan ia takut apabila perutnya semakin membesar dan tidak dinikahi oleh terdakwa yang bernama Sukri Bin Darmin. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya, Majelis Hakim didalam Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 465/ Pid.B/ PN.Bjn menyatakan Sukri Bin Darmin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” dengan hukuman penjara selama 3 tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kekuatan alat bukti keterangan saksi yang berbeda antara berita acara pemeriksaan di penyidik dengan keterangan saksi di persidangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh keterangan saksi yang berbeda antara berita acara pemeriksaan di penyidik dengan keterangan saksi di persidangan berpengaruh terhadap putusan hakim Nomor: 465/PID.B/2009/PN.BJN.

¹ Sumber Bahan Hukum Primer Berita Acara Pemeriksaan penyidik No.Pol. Perkara: BAP/118/VI/2009/Res.Bjn

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah *yuridis normatif*. Penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.² yaitu meneliti putusan Nomor 465/PID.B/2009/PN.BJN. Penelitian ini hanya menganalisis norma yang mengatur objek penelitian. Penelitian yang berjudul “kekuatan alat bukti keterangan saksi yang berbeda antara berita acara pemeriksaan di penyidik dengan keterangan saksi di persidangan terhadap putusan hakim Nomor 465/PID.B/2009/PN.BJN” dalam hal ini mengkaji secara mendalam mengenai norma yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tersebut.

B. Metode Pendekatan

Berkaitan dengan jenis penelitian hukum normatif, maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, maka metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*case Approach*) yang terdiri atas:³

1. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah hukum yang sedang ditangani.⁴
2. Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan kasus (*case Approach*) yaitu untuk menganalisa berbagai aturan hukum yang menjadi landasan dalam kekuatan alat bukti keterangan saksi yang berbeda antara Berita Acara Pemeriksaan penyidik dengan berita acara persidangan terhadap putusan hakim dalam peraturan perundang-undangan serta contoh kasus pada putusan Pengadilan Negeri 465/PID.B/2009/PN.BJN tentang dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan.

² Johnny Ibrahim, **Teori&Metodelogi Penelitian Hukum normatife**, Bayumedia, Malang, 2011, hlm. 295

³ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Prenada Media, Jakarta, 2005, Hlm.140.

⁴ M. Syamsudin, **Oprasionalisasi Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta ,2007, hlm. 58

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis Bahan Hukum yang dalam penelitian hukum diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum Primer, Sekunder, dan Tersier.

1. Bahan Hukum Primer yakni bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas.⁵ Didalam penelitian ini penulis mengkaji ketentuan yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengaruh keterangan saksi yang tidak sesuai antara berita acara pemeriksaan penyidik dengan putusan hakim, yang terdiri atas:
 - (1) Pasal 163 dalam KUHAP (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana).
 - (2) Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Nomor. Pol: BP/118/VI/2009/RESKRIM
 - (3) Berita Acara Persidangan Nomor: 465/Pid.B/2009/ PN.Bjn
 - (4) Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 456/Pid.B/2009/PN.BJN
2. Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri atas jurnal, buku-buku referensi, karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian ilmiah yang mengulas tentang masalah hukum yang diteliti.

Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya publikasi artikel melalui media internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Analisis data dilakukan pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik, Berita Acara Pengadilan, Putusan dan Perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan pembuktian keterangan saksi yang tidak sesuai dengan metode penafsiran hukum gramatikal dan tata bahasa, dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan menghubungkannya, kemudian disajikan dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, dan efektif, sehingga

⁵ Soejono Soekanto dan H. Abdurahman, **Op.cit.**, Hlm.141.

mempermudah interpretasi yang digunakan adalah interpretasi gramatikal untuk memperoleh makna dibalik kata-kata dalam setiap data.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan pada berita acara pemeriksaan penyidik, Berita Acara Pengadilan, Putusan dan Perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan pembuktian keterangan saksi yang tidak sesuai dengan metode penafsiran hukum gramatikal dan tata bahasa, dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan menghubungkannya, kemudian disajikan dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, dan efektif, sehingga mempermudah interpretasi yang digunakan adalah interpretasi gramatikal untuk memperoleh makna dibalik kata-kata dalam setiap data.

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran, maka penulis memberikan Definisi Konseptual sebagai berikut:

1. Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana alat-alat tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.
2. Keterangan Saksi adalah Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
3. BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah catatan atau tulisan yang bersifat otentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik/penyidik pembantu atas kekuatan sumpah jabatan, yang memuat unsur-unsur tindak pidana yang mencakup/memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan.
4. Putusan adalah vonis berupa penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana bujuk rayu yang mengakibatkan persetubuhan.
5. Hakim dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang pernah menangani perkara tindak pidana asusila.

6. Putusan Hakim adalah Suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

PEMBAHASAN

Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Berbeda Antara Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Dengan Keterangan Yang Diberikan Di Persidangan.

Salah satu titik berat pemeriksaan saksi sebagai alat bukti ditunjukkan kepada suatu permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian, yaitu syarat sahnya keterangan saksi. Alat bukti keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang paling utama dalam suatu perkara pidana. Nilai dan kekuatan pembuktian, keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian. Berdasarkan pasal 185 ayat 1 menjelaskan bahwa “Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari keterangan orang lain atau *testimonium de auditu*”. Sesuai dengan penjelasan KUHAP bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak diperkenan sebagai alat bukti. Dengan demikian keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti yang sah. Sesuai dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil, untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Alat bukti memiliki nilai kekuatan pembuktian yang harus dipenuhi antara lain:⁶

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji. Berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHAP dan pasal 160 ayat 4 KUHAP.
2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti. Berdasarkan pasal 1 ayat 27 KUHAP sehubungan dengan pasal 185 ayat 1 KUHAP, dapat ditarik kesimpulan: **pertama**, setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri, di luar apa yang dilihat, di luar apa yang dialaminya, tidak dapat dijadikan serta dinilai sebagai alat bukti. **Kedua**, “*testimonium de auditu*” atau keterangan yang diperoleh dari pendengaran orang lain merupakan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti.
3. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi berdasarkan pasal 185 ayat 5 KUHAP.
4. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan yang bertujuan agar saksi dapat dinilai sebagai alat bukti sesuai dengan pasal 185 ayat 1 KUHAP.
5. Keterangan saksi saja dirasa belum cukup. Hal ini sesuai dengan penegasan pasal 183 KUHAP tentang hakim tidak boleh menjatuhkan putusan jika alat bukti sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti.

⁶ Syaiful Bakhri, **Beban Pembuktian**, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, Hlm. 58-61.

Perbedaan keterangan saksi di muka persidangan dengan keterangan yang diberikan dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan sering terjadi. Keterangan saksi yang diberikan di muka persidangan itulah yang benar, karena saksi tersebut menginsyafi bahwa ia telah disumpah dan harus memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Alasan perbedaan keterangan saksi yang diberikan antara pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan dengan di muka persidangan dapat dimengerti misalnya ada unsur paksaan dari seorang pihak dalam kasus Sukri bin Darmin yang saksi korbannya Novi sri utami mendapat paksaan dari ibu ummu untuk memberikan keterangan dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan bahwa saudara sukrilah yang didakwakan yang menghamili korban. Karena menurut ibu ummu masalahnya agar cepat selesai dan kehamilannya yang semakin membesar ada yang bertanggung jawab. Dalam hal ini terdapat dua penyimpangan, penyimpangan yang dapat diterima karena alasan yang masuk akal dan penyimpangan yang tidak diterima karena keterangan yang diberikan saksi tidak masuk akal maka hal tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dalam persidangan.

Berdasarkan teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang sehingga hakim memperoleh keyakinan yang akan diambil.⁷ Dengan bertitik tolak pandangan tersebut, maka dapat diketahui bahwa pembuktian harus dilakukan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁸ Menurut teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang negatif tersebut lebih dipilih oleh sistem pembuktian di Indonesia. Berdasarkan prinsip teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif maka terdakwa dapat dikatakan bersalah atau tidak yaitu:

1. Pembuktian harus menggunakan alat bukti yang sah menurut undang-undang,
2. Keyakinan hakim juga harus berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Keterangan saksi yang berbeda antara keterangan saksi yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dengan keterangan saksi yang diberikan waktu persidangan pada umumnya, majelis hakim lebih menggunakan teori pembuktian menurut undang-undang negatif karena pembuktian keterangan saksi

⁷ Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, Hlm 53

⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita Op.Cit, Hlm. 17

tersebut harus berdasarkan undang-undang selain itu dalam menentukan keyakinan hakim harus berdasarkan undang-undang. Hakim dalam persidangan hanya mengingatkan seorang saksi untuk memberikan keterangan dengan jujur yang bertujuan untuk membantu pengadilan guna mewujudkan kebenaran materiil. Berdasarkan pasal 163 KUHAP bahwa jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan sidang. Bilamana seorang saksi menarik atau mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik, maka berlakulah ketentuan pasal 185 ayat 1 KUHAP bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dengan demikian, fungsi keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di penyidik hanyalah sebagai alat bukti petunjuk yang diatur dalam pasal 188 ayat 2 KUHAP dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

Keterangan Saksi Yang Berbeda Antara Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Dengan Berita Acara Persidangan Berpengaruh Terhadap Putusan Hakim Nomor 465/PID.B/2009/PN.BJN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 1 ayat 27 menjelaskan tentang keterangan saksi yaitu salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik tidak memiliki kekuatan pembuktian hukum yang sempurna yang artinya bagi hakim isi dari Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan tidak dapat dipakai dasar untuk memberikan bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan seorang saksi atau terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah. Berdasarkan Pasal 185 ayat 1 KUHAP bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi memberikan di sidang pengadilan. Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan sebagai hasil pemeriksaan pihak penyidik, baik terhadap saksi maupun tersangka, tidak lebih dari sekedar pedoman bagi hakim untuk menjalankan pemeriksaan.

Berdasarkan Pasal 185 ayat 6 bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- i. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- ii. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- iii. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;

Hakim yang menilai dan menentukan kesesuai antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Kekuatan pembuktian juga terletak pada bukti yang diajukan, apakah bukti tersebut relevan atau tidak dengan perkara yang sedang disidangkan. Jika bukti tersebut relevan, kekuatan pembuktian selanjutnya mengarah pada apakah bukti tersebut dapat diterima atau diabaikan.

Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 465/ PID.B/2009/PN.BJN tersebut hakim memutus pidana selama 3 tahun. Sebaiknya hakim juga meninjau persesuaian keterangan saksi yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan dengan keterangan saksi di persidangan. Walaupun persesuaian keterangan saksi di persidangan dengan keterangan saksi yang diberikan pada waktu Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan bukanlah sebagai syarat dari kekuatan bukti suatu keterangan saksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat 1 KUHAP yang menjelaskan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, pertimbangan kesesuaian tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 163 KUHAP yang memerintahkan pada hakim untuk mengingatkan saksi jika ada keterangan di persidangan berbeda dengan keterangannya ditingkat penyidikan. Berdasarkan putusan kasus sukri ini menjelaskan bahwa:

- a. Keterangan Novi Sri Utami binti Surip selaku saksi dan korban dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik telah dicabutnya 2 hari kemudian dan di dalam persidangan saksi Novi sri utami juga mencabut keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidikan.
- b. Keterangan saksi Yati Binti Surip, Nurhayati Binti Kaswan, saksi Ummu, S.Pd. dari P3 A (Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak) Kabupaten Bojonegoro, Dwi Irianto, SH dan saksi tambahan yang diajukan, Watipah dari anggota polres bojonegoro yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan keterangan saksi, para saksi-saksi tersebut semuanya bersumber dari keterangan pendengaran dari orang lain, sedangkan Watipah keterangan yang diberikannya adalah hasil interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa, dengan kata lain bahwa keterangan saksi Watipah tersebut juga bersumber dari orang lain atau *testimonium de auditu*, sehingga

keterangan saksi yang demikian ini bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat 26 dan 27 KUHAP dan oleh karena itu tidak bernilai sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Sebaiknya putusan hakim lebih mengutamakan keadilan yang sebagaimana dalam teori keadilan menurut hukum. Keadilan hukum adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegakkan lewat proses hukum, umumnya oleh pengadilan.⁹ Unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan hukum yaitu:

- a. Harus ada ketentuan yang mengatur bagaimana memberlakukan manusia dalam kasus-kasus tertentu yang dihadapinya.
- b. Ketentuan hukum tersebut harus jelas sasaran pemberlakuannya. Dalam hal ini mesti ada ketentuan yang menentukan apakah aturan hukum tersebut berlaku untuk orang dalam semua kategori, atau hanya berlaku untuk kategori orang tertentu saja.
- c. Aturan hukum tersebut haruslah diterapkan secara tidak memihak dan tanpa diskriminasi kepada setiap orang yang memenuhi kualifikasi pengaturannya.¹⁰

Faktor-faktor yang mendorong majelis hakim dalam menjatuhkan suatu putusan seharusnya perlu diperhitungkan dalam kasus Novi sri utami dan terdakwa sukri tersebut, karena dalam menjatuhkan suatu putusan majelis hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor atau alasan-alasan yang diungkapkan saksi bahkan terdakwa di dalam persidangan. Menurut Lilik Mulyadi faktor-faktornya adalah sebagai berikut:

a. Faktor Subjektif

1) Sikap Prilaku yang Apriori

Sering kali dalam mengadili suatu perkara sejak awal hakim telah memiliki suatu prasangka atau dugaan bahwa terdakwa bersalah sehingga harus di hukum atau dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Sikap ini jelas bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, terutama dalam perkara pidana. yang bersifat memihak salah satu pihak dan tidak adil ini bisa saja terjadi karena hakim terjebak oleh rutinitas penanganan perkara yang menumpuk dan target penyelesaian yang tidak seimbang

⁹ Munir Fuady, **Dinamika Teori Hukum**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 118.

¹⁰ Shoimatul Fitriana, **Analisis yuridis Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 375/Pid.B/2010/PN.MLG Tentang Tindak Pidana Perkosaan**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, Hlm 100-101.

2) Sikap Perilaku Emosional

Perilaku hakim yang mudah tersinggung, pendendam dan pemaarah akan berbeda dengan perilaku hakim yang penuh pengertian, sabar dan teliti dalam menganalisis suatu perkara. Hal ini jelas sangat berpengaruh pada hasil putusannya.

3) Sikap *arrogance power*

Hakim memiliki sikap arogan, merasa dirinya berkuasa dan pintar melebihi orang lain seperti jaksa, penasehat hukum apalagi terdakwa atau pihak-pihak yang bersengketa lainnya, seringkali mempengaruhi suatu keputusan. Sikap arogan yang pada manusia terkadang timbul dengan sendirinya akan tetapi disini hakim harus bisa meminimalisir sikap arogan yang timbul agar jalannya persidangan tidak sepihak entah berpihak meringankan terdakwa maupun korban.

4) Moral

Faktor ini merupakan landasan yang sangat vital bagi insan penegak keadilan, terutama hakim. Faktor ini yang berfungsi membentengi tindakan hakim terhadap cobaan-cobaan yang mengarah pada penyimpangan, penyelewengan dan sikap tidak adil lainnya. Faktor ini sangat berpengaruh terhadap hasil putusan hakim, sebab bagaimanapun juga pribadi seseorang hakim diliputi oleh moral pribadi hakim tersebut, terlebih dalam memeriksa serta memutus suatu perkara. Moral hakim disini adalah sangat perlu kita perhatikan lebih lanjut karena hal itu sangat rentan dengan praktik di lapangnya selain banyaknya penyimpangan, penyelewengan terkadang hakim juga bisa tergiur akan penyuapan maka dari itu hakim wajib mempunyai moral baik dan benar dalam memutuskan suatu perkara yang ditanganinya.

b. Faktor Objektif

1) Latar Belakang Sosial, Budaya dan Ekonomi

Latar belakang sosial seorang hakim mempengaruhi sikap perilaku hakim. Dalam beberapa kajian sosiologis menunjukkan bahwa hakim yang berasal dari status sosial tinggi berbeda cara memandang suatu permasalahan yang ada dalam masyarakat dengan hakim yang berasal dari lingkungan budaya yang halus. Suatu hal lagi yang dalam banyak hal memepengaruhi perilaku hakim adalah latar belakang ekonomi bisa saja karena desakan ekonomi, seorang hakim yang pada awalnya memiliki pendirian yang teguh, memiliki komitmen yang kuat pada

idealismenya, secara berangsur-angsur melemahkan pendiriannya atau mlunturkan idealisme dan menjadikannya bersifat pragmatis.

2) Profesionalisme

Profesionalisme yang meliputi pengetahuan, wawasan dan keahlian yang ditunjang dengan ketentuan dan ketelitian merupakan faktor yang mempengaruhi cara hakim dalam mengambil keputusan. Masalah profesionalisme ini juga sering dikaitkan dengan kode etik di lingkungan peradilan. Maka dari itu hakim yang menangani suatu perkara dengan berpegang teguh pada etika profesi tentu akan menghasilkan putusan yang lebih dapat dipertanggung jawabkan dibandingkan dengan hakim yang tidak berpegang teguh kepada etika profesi.¹¹

Berdasarkan hasil penelitian yang mendasari hakim dalam menjatuhkan suatu putusan di pengadilan ada 2 faktor yaitu faktor subjektif dan faktor objektif. Dalam kedua faktor tersebut terdapat faktor subjektif yang terdiri dari sikap perilaku yang apriori, sikap perilaku emosional, sikap arogan, moral. Sedangkan faktor objektif terdiri dari sifat latar belakang sosial dan ekonomi serta sifat profesionalisme. Dari faktor subjektif dan objektif harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan perkara pidana agar putusan yang dijatuhkan dapat menghasilkan putusan yang adil dan dapat dipertanggung jawabkan kelak.

Pengucapan sumpah juga dilakukan oleh para saksi sebelum dilaksanakannya persidangan. Berdasarkan analisis pada kasus Sukri bin Darmin disini terdapat temuan tentang tindak pidana baru sehubungan dengan rekayasa keterangan saksi. Para saksi yang memberikan keterangannya dalam kasus tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh terdakwa Sukri bin Darmin merekayasa keterangan yang diberikan di dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan serta keterangan saksi yang diberikan dalam persidangan. Keterangan para saksi berikan sudah di rencanakan sedemikian rupa agar terdakwa Sukri bin Darmin tersebut dapat bertanggung jawab atas kehamilan yang dialami oleh Novi sri utami selaku saksi korban.

¹¹ Lilik Mulyadi, Op, Cit. Hlm 26

Berdasarkan perkara Sukri bin Darmin ada beberapa saksi dimana keterangan yang diberikan adalah sebuah rekayasa, misalnya keterangan yang diberikan oleh saksi korban Novi binti Surip disini Novi memberikan keterangannya seakan-akan yang telah menghamilinya adalah terdakwa sukri dengan alasan apabila Novi tidak mengatakan bahwa yang menghamilinya adalah sukri maka Novi takut karena perutnya sudah semakin besar dan ia takut apabila tidak jadi dinikahi oleh terdakwa. Saksi lain yang memberikan keterangan yang direkayasa adalah yati binti surip selaku kakak korban. Alasan yang dikemukakan yati sama seperti yang Novi berikan kepada hakim bahwa yati takut adiknya tidak dinikahi oleh terdakwa. Keterangan yang diberikan oleh nurhayati binti madechan selaku istri dari terdakwa juga termasuk rekayasa karena nurhayati bermaksud untuk menyelamatkan suaminya dan agar terdakwa tidak ditahan.

Berdasarkan praktiknya bahwa keterangan saksi yang diberikan diduga tidak benar karena terdapat unsur rekayasa keterangan saksi. Sering kali keterangan seorang saksi yang diberikan pada proses persidangan bukan yang sebenar-benarnya atau pemberian keterangan palsu maka saksi tersebut diduga melakukan sumpah palsu. Oleh sebab itu, hakim ketua sidang atas jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah dengan bentuk penetapan supaya saksi tersebut ditahan dengan dakwaan sumpah palsu. Terhadap dakwaan ini, panitera pengganti segera membuat berita acara sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan bahwa berita acara dan keterangan saksi itu adalah palsu. Hal tersebut akan ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera. Sumpah palsu dan keterangan palsu tersebut dijelaskan dalam pasal 242 ayat 1 KUHP yaitu menjelaskan bahwa barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Berdasarkan penelitian ini, putusan hakim tidak dipengaruhi oleh keterangan saksi yang berbeda antara Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan dengan keterangan saksi yang diberikan di persidangan. Dalam teori pembuktian menurut undang-undang negatif merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa yaitu alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan adanya keyakinan (nurani) dari hakim, sehingga

berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim yakin akan kesalahan seorang terdakwa. Antara alat-alat bukti dengan keyakinan yang dimiliki hakim harus ada hubungan sebab-akibat yang nantinya putusan itu bisa dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan putusan hakim nomor 465/PID.B/2009/PN.BJN yang memutus sukri dengan pasal 81 ayat 1 tentang Undang-undang perlindungan anak dengan pidana penjara selama 3 tahun. Keterangan saksi yang diberikan tidak mempengaruhi putusan yang dijatuhkan hakim karena keterangan saksi yang diberikan tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan hukum. Menurut teori pembuktian menurut undang-undang negatif mengatur sekurang-kurangnya dalam pembuktian terdapat dua alat bukti yang sah sehingga alat bukti tersebut dapat membantu meringankan seorang terdakwa. Tetapi dalam kasus sukri keterangan saksi tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali selain keterangan yang diberikan oleh saksi berasal dari keterangan orang lain disini saksi korban juga melakukan tindak pidana rekayasa keterangan saksi yang dengan sengaja agar sukri sebagai terdakwa mau bertanggung jawab.

Peran hakim .dalam kasus sukri ini hakim mempunyai keyakinan jika seorang laki-laki dan wanita berada dalam suatu ruangan atau bisa disebut kamar maka keduanya tidak mungkin tidak melakukan apa-apa. Disini hakim menggunakan logikanya untuk lebih mengikat hakim terhadap keyakinannya hal ini bertujuan agar ada patokan-patokan dalam melaksanakan peradilan pidana. Dengan demikian, apabila undang-undang tidak bisa memberi peraturan yang dapat dipakai untuk menyelesaikan suatu perkara maka hakim haruslah mampu menemukan hukum baru dalam rangka mengisi kekosongan hukum tersebut demi tercapainya tujuan negara hukum yaitu keadilan, kepastian dan kebahagiaan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Alat bukti keterangan saksi yang berbeda antara Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan dengan keterangan saksi di persidangan tidak mempunyai kekuatan alat bukti yang sah.
2. Keterangan saksi yang berbeda antara Berita acara Pemeriksaan di penyidikan dengan keterangan saksi yang diberikan di persidangan tidak berpengaruh putusan hakim Nomor 465/PID.B/2009/PN.BJN.

Saran-saran

1. Hakim hendaknya dalam menjatuhkan suatu putusan sebaiknya tidak meninggalkan teori dan perundang-undangan.
2. Hakim hendaknya dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa lebih mengacu pada keadilan agar antara korban dan terdakwa tidak ada yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta
- Ashofa, Burhan, 2002, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1991, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2004, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hari Sangka Dan Lily Rosita, 1996, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Sinar Wijaya, Surabaya
- Leden Marpaung, 2001, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh: Pemberantasan Dan Preveninya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Masruchin Ruba'i, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- P. A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Subekti, 1983, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Waluyo Bambang, 1991, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Melton Putra Offset, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI 1945)*
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, 2007, Sinar Grafika.
- KUHAP (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)*. 2007, Sinar Grafika.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. 2010, Mandar Maju, Bandung.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, 2012, Pena Pustaka, Yogyakarta.